

## **Tahapan Kebijakan Pendidikan** *Stages of Education Policy*

**Rizal Alfa Rizih, M Rifki Zailufti Zainal, Afriza & Muhammad Amin**  
UIN Sultan Syarif kasim, Pekanbaru, Riau, Indonesia  
[ralfarizi965@gmail.com](mailto:ralfarizi965@gmail.com), [rifki03zailufti@gmail.com](mailto:rifki03zailufti@gmail.com), [afriza@uin-suska.ac.id](mailto:afriza@uin-suska.ac.id),  
[muhammadaminfst@gmail.com](mailto:muhammadaminfst@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan dalam proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyusunan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan memegang peran penting dalam menentukan efektivitas kebijakan tersebut. Identifikasi masalah, analisis kebutuhan, serta keterlibatan stakeholder adalah langkah kunci dalam penyusunan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Kesimpulannya, pemahaman mendalam terhadap setiap tahapan kebijakan pendidikan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan & Evaluasi Kebijakan

### **Abstract**

*This study aims to analyze the stages involved in the formulation, implementation, and evaluation of educational policies in Indonesia. The research employs a library research method with qualitative and descriptive approaches. The findings indicate that the stages of agenda setting, policy formulation, implementation, and evaluation are crucial in determining the effectiveness of educational policies. Key steps such as problem identification, needs analysis, and stakeholder involvement are essential for developing policies that are relevant and responsive to social and technological changes. In conclusion, a deep understanding of each stage of educational policy-making and active participation from various stakeholders can enhance the quality and sustainability of the education system.*

*Keywords: Educational Policy, Policy Implementation & Policy Evaluation*

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Sistem pendidikan yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan berbudaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan pendidikan yang tepat dan efektif. Namun, dalam proses pembentukan kebijakan pendidikan, seringkali terjadi tantangan dan kompleksitas yang memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui.

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, tuntutan akan peningkatan kualitas pendidikan semakin meningkat. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan harus mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai tahapan kebijakan pendidikan sangatlah penting.

Proses penyusunan kebijakan pendidikan tidaklah sederhana. Sebagai suatu keputusan yang

bersifat strategis, kebijakan pendidikan memerlukan analisis yang mendalam terhadap berbagai faktor yang terlibat. Mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, hingga implementasi dan evaluasi, setiap tahapan dalam proses kebijakan pendidikan memiliki peran yang krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan (Muhammad Hajar & Muhammad Amin Wan Khoir, 2022).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan menjadi sorotan penting mengingat peran strategis pendidikan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Dengan populasi yang besar dan beragam, tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan pun semakin kompleks. Berbagai isu seperti kesenjangan akses pendidikan, kualitas guru, kurikulum yang relevan, serta tuntutan pasar kerja yang dinamis menjadi fokus perhatian dalam pembentukan kebijakan pendidikan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* untuk mendalami tahapan kebijakan pendidikan dengan interpretasi

sesuai konteks penelitian. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam terhadap proses penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan revisi kebijakan pendidikan, sementara pendekatan deskriptif memberikan gambaran rinci tentang data yang dikumpulkan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode library research, yang melibatkan pencarian literatur-literatur relevan dengan kebijakan pendidikan. Sumber data diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang memantau perkembangan isu-isu terkait kebijakan pendidikan, dengan analisis mendalam guna menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Penyusunan Agenda Kebijakan Pendidikan**

Penyusunan agenda kebijakan pendidikan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan pendidikan. Agenda kebijakan menjadi landasan untuk menentukan arah dan prioritas kebijakan yang akan diambil dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan (Isjoni & Arif Ismail, 2021). Dalam konteks penyusunan

agenda kebijakan pendidikan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan agar agenda yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

#### **a. Identifikasi Masalah Pendidikan**

Langkah pertama dalam penyusunan agenda kebijakan pendidikan adalah identifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi dalam sistem pendidikan. Masalah-masalah tersebut bisa berupa rendahnya kualitas pendidikan, kesenjangan akses pendidikan, kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan, atau isu-isu lain yang memengaruhi efektivitas sistem pendidikan. Identifikasi masalah ini akan menjadi dasar untuk menentukan prioritas kebijakan yang perlu diambil.

#### **b. Analisis Kebutuhan**

Setelah masalah-masalah pendidikan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini melibatkan pemetaan kebutuhan pendidikan berdasarkan kondisi riil yang ada. Misalnya, apakah diperlukan peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum yang lebih relevan, atau peningkatan akses pendidikan bagi

masyarakat pedalaman. Analisis kebutuhan ini akan membantu dalam menentukan langkah-langkah konkret yang perlu diambil dalam penyusunan agenda kebijakan.

### **c. Konsultasi dan Partisipasi Stakeholder**

Agenda kebijakan pendidikan yang efektif harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam dunia pendidikan. Konsultasi dan partisipasi stakeholder merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa agenda kebijakan yang disusun mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pihak terkait. Melibatkan guru, siswa, orang tua, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat secara luas akan memperkuat legitimasi dan penerimaan terhadap kebijakan yang dihasilkan (Nurul Fadilah & Lidya Herlina, 2022).

### **d. Penyusunan Tujuan dan Sasaran**

Agenda kebijakan pendidikan harus jelas dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*) akan membantu dalam

mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan. Penyusunan tujuan dan sasaran yang tepat juga akan memudahkan dalam penentuan indikator keberhasilan dan strategi pencapaian tujuan.

### **e. Prioritaskan Isu Strategis**

Dalam menyusun agenda kebijakan pendidikan, penting untuk memprioritaskan isu-isu strategis yang memiliki dampak besar terhadap sistem pendidikan. Prioritaskan isu-isu yang mendesak dan krusial agar sumber daya dan energi dapat difokuskan pada hal-hal yang paling penting. Memahami urgensi dari setiap isu akan membantu dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam implementasi kebijakan.

### **f. Penyusunan Rencana Aksi**

Agenda kebijakan pendidikan harus disertai dengan rencana aksi yang konkret dan terukur. Rencana aksi ini akan menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan harus dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya akan dievaluasi. Penyusunan rencana aksi yang terperinci akan memudahkan

dalam monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan.

#### **g. Evaluasi dan Revisi**

Agenda kebijakan pendidikan tidak bersifat statis, melainkan harus dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi agenda kebijakan perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi ini akan membantu dalam mengevaluasi capaian tujuan, mengidentifikasi hambatan-hambatan, dan melakukan perbaikan atau revisi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Penyusunan agenda kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara berbagai pihak terkait. Dengan menyusun agenda kebijakan pendidikan yang baik, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Agenda kebijakan yang tepat akan membantu mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik dan merata bagi semua warga negara (Olivia Cahya Erna, Retno Yunitasari, 2021).

## **2. Formulasi kebijakan Pendidikan**

Formulasi kebijakan pendidikan adalah proses merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan visi pendidikan yang diinginkan. Proses formulasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai tahapan yang meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, pembuatan kebijakan, hingga evaluasi kebijakann (Muhammad Kristiawan, 2022). Berikut adalah beberapa langkah penting dalam formulasi kebijakan pendidikan:

### **a. Identifikasi Masalah Pendidikan**

Langkah pertama dalam formulasi kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi dalam sistem pendidikan. Masalah-masalah tersebut bisa berupa rendahnya mutu pendidikan, ketimpangan akses pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, atau isu-isu lain yang memengaruhi efektivitas pendidikan. Identifikasi masalah ini menjadi dasar untuk menentukan urgensi dan prioritas kebijakan yang perlu diambil.

### **b. Pengumpulan Data dan Analisis**

Setelah masalah-masalah pendidikan diidentifikasi, langkah selanjutnya dalam formulasi kebijakan adalah pengumpulan data dan analisis mendalam terkait masalah-masalah tersebut. Data-data yang diperlukan bisa berupa data statistik, studi kasus, hasil penelitian, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Analisis data akan membantu dalam memahami akar permasalahan dan menentukan solusi yang tepat.

### **c. Pembuatan Kebijakan**

Setelah data dan analisis dilakukan, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang telah diidentifikasi. Kebijakan pendidikan harus dirancang dengan jelas, spesifik, dan terukur, serta harus sesuai dengan tujuan dan visi pendidikan nasional. Kebijakan juga harus memperhatikan kebutuhan berbagai pihak terkait, seperti siswa, guru, orang tua, dan masyarakat (Lailatul Mutakinati, Kurnia Anam, 2020).

### **d. Konsultasi dan Partisipasi Stakeholder**

Proses formulasi kebijakan pendidikan juga harus melibatkan konsultasi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam dunia pendidikan. Melibatkan guru, siswa, orang tua, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat secara luas akan memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Partisipasi stakeholder akan membantu dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pihak terkait.

### **e. Implementasi Kebijakan**

Setelah kebijakan pendidikan dirumuskan, langkah berikutnya adalah implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan memerlukan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang baik antar berbagai lembaga terkait. Proses implementasi kebijakan juga harus disertai dengan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan (Muhammad Marzuki & Ahmad Sofyan, 2020).

#### **f. Evaluasi dan Revisi**

Proses formulasi kebijakan pendidikan tidak berhenti pada tahap implementasi, namun juga melibatkan evaluasi dan revisi kebijakan secara berkala. Evaluasi kebijakan akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan, mengidentifikasi hambatan-hambatan, serta menentukan perbaikan atau revisi yang diperlukan. Revisi kebijakan secara berkala akan memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan pendidikan.

#### **g. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan**

Pemantauan dan evaluasi kebijakan pendidikan merupakan langkah penting dalam menilai efektivitas dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi, hambatan yang muncul, serta potensi perbaikan yang diperlukan. Evaluasi kebijakan juga membantu dalam mengevaluasi pencapaian tujuan kebijakan serta menentukan apakah kebijakan perlu direvisi atau ditingkatkan (Susilo, 2019).

Formulasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan komitmen serta kerja sama semua pihak terkait. Dengan merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat, diharapkan dapat terwujud sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan (Ririn Rahmawati Anggraini, 2019).

#### **3. Legitimasi Kebijakan Pendidikan**

Legitimasi kebijakan pendidikan mengacu pada tingkat penerimaan, dukungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan. Legitimasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan dan efektivitas kebijakan pendidikan, karena kebijakan yang mendapatkan legitimasi yang kuat cenderung lebih mudah diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diinginkan (Thalhah, 2021). Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi legitimasi kebijakan pendidikan:

### **a. Transparansi dan Akuntabilitas**

Kebijakan pendidikan yang transparan dan akuntabel cenderung mendapatkan legitimasi yang lebih tinggi dari masyarakat. Transparansi dalam proses formulasi kebijakan, alokasi sumber daya, dan implementasi kebijakan akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan legitimasi kebijakan.

### **b. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat**

Melibatkan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan. Partisipasi masyarakat memungkinkan berbagai pihak untuk memberikan masukan, pendapat, dan aspirasi terkait kebijakan pendidikan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kebijakan pendidikan akan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih baik, sehingga mendapatkan dukungan yang lebih luas.

### **c. Konsistensi dengan Nilai dan Tujuan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan yang konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan nasional akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Konsistensi kebijakan dengan prinsip-prinsip inklusivitas, keadilan, mutu, dan kesetaraan akan memperkuat legitimasi kebijakan. Kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan atau tujuan pendidikan nasional cenderung kurang mendapatkan dukungan masyarakat (Budiman Rusli, 2020).

### **d. Komunikasi Efektif**

Komunikasi yang efektif tentang kebijakan pendidikan kepada masyarakat sangat penting dalam membangun legitimasi kebijakan. Pemerintah perlu menjelaskan secara jelas tujuan, manfaat, dan dampak kebijakan kepada masyarakat. Komunikasi yang transparan, terbuka, dan mudah dipahami akan membantu dalam memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

### **e. Evaluasi dan Responsif Terhadap Masukan**

Proses evaluasi kebijakan dan responsif terhadap masukan dari masyarakat juga dapat

meningkatkan legitimasi kebijakan pendidikan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan merespons masukan serta kritik yang diterima, pemerintah dapat menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **f. Keterbukaan terhadap Diversitas dan Inklusivitas**

Keterbukaan terhadap diversitas dan inklusivitas dalam kebijakan pendidikan juga merupakan faktor yang memengaruhi legitimasi kebijakan. Kebijakan yang mampu mengakomodasi keberagaman budaya, agama, etnis, dan kebutuhan pendidikan masyarakat yang beragam akan lebih mudah diterima dan didukung oleh masyarakat. Memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak diskriminatif dan inklusif bagi semua kelompok akan meningkatkan legitimasi kebijakan tersebut (Ahmad Nurdin, 2018).

#### **g. Pembangunan Kemitraan dan Jaringan**

Pembangunan kemitraan dan jaringan dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat,

dan sektor swasta, dapat memperkuat legitimasi kebijakan pendidikan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan memperluas dukungan dan partisipasi dalam implementasi kebijakan. Melalui pembangunan kemitraan yang kuat, pemerintah dapat memperoleh legitimasi yang lebih luas dan memastikan keberlanjutan kebijakan pendidikan.

#### **h. Responsif terhadap Tantangan dan Perubahan**

Kebijakan pendidikan yang responsif terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan lebih dihormati dan diakui legitimasinya. Kemampuan pemerintah untuk merespons dinamika sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang akan membuktikan bahwa kebijakan pendidikan tetap relevan dan efektif. Dengan tetap memperbarui dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan zaman, pemerintah dapat mempertahankan tingkat legitimasi yang tinggi.

#### **i. Keterlibatan Pihak Terkait dalam Implementasi**

Melibatkan pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan komunitas lokal, dalam

implementasi kebijakan pendidikan juga dapat meningkatkan legitimasi kebijakan. Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan akan memperkuat dukungan dan penerimaan terhadap kebijakan tersebut. Dengan melibatkan pihak terkait secara langsung, kebijakan pendidikan akan lebih terkoneksi dengan kebutuhan dan realitas di lapangan.

#### **j. Penguatan Etika Kepemimpinan dan Kepemimpinan Moral**

Penguatan etika kepemimpinan dan kepemimpinan moral dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan juga berkontribusi terhadap legitimasi kebijakan. Kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan akan memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Kepemimpinan yang moral dan bertanggung jawab akan menciptakan kepercayaan dan dukungan yang lebih besar terhadap kebijakan pendidikan yang dijalankan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, pemerintah

dapat membangun legitimasi kebijakan pendidikan yang kuat dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Legitimasi yang tinggi akan memperkuat implementasi kebijakan pendidikan, menciptakan keberlanjutan, serta mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan (Rianto Nugroho, 2019).

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari penelitian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan, tahapan-tahapan yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan legitimasi memiliki peran yang sangat penting. Memahami dan menjalankan setiap tahapan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan serta mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Dalam proses penyusunan agenda kebijakan pendidikan, langkah awal yang penting adalah identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada dalam sistem pendidikan. Dengan menetapkan agenda yang jelas dan berdasarkan analisis yang komprehensif,

pemerintah dapat fokus pada pemecahan masalah yang mendesak dan penting. Selanjutnya, tahap formulasi kebijakan memerlukan proses yang teliti dan komprehensif dalam merancang kerangka kebijakan yang tepat. Dalam tahap ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melakukan konsultasi publik, dan memperhitungkan berbagai faktor yang relevan untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Keselarasan antara agenda kebijakan dan formulasi kebijakan akan menentukan arah dan efektivitas kebijakan yang akan diimplementasikan.

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan tahap yang krusial dalam mewujudkan visi dan tujuan kebijakan. Proses implementasi memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, alokasi sumber daya yang memadai, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Langkah-langkah konkret dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan akan menentukan keberhasilan dan dampak kebijakan tersebut terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Nuridin, A. (2018). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Problematika Pendidikan di Indonesia. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 2(2), 225–238.
- Rusli, B. (2020). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. PT Refika Aditama.
- Susilo, Dwi. (2019). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah," *Khazanah Pendidikan*. *Khazanah Pendidikan*, 13(1), 1–12.
- Isjoni & Ismail A. (2021). *Kebijakan Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0*. Ombak.
- Lailatul Mutakinati, Kurnia Anam, & R. H. (2020). Kebijakan Pendidikan Karakter Di Sekolah. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 5(2), 258–271.
- Hajar, M & Muhammad Amin W., K. (2022). Peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dalam Optimalisasi Mutu Pendidikan Di Indonesia.

*Islamic Education Policy Journal*, 3(1), 18–32.

Muhammad Kristiawan, D. (2022). *Manajemen Pendidikan*. Deepublish Publisher.

Marzuki, M & Sofyan, A. (2020). Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 12(1), 49–62.

Fadilah, N & Lidya Herlina. (2022). Analisis Kebijakan Publik Dalam Peningkatan Mutu Madrasah. *Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 102–118.

Cahya, E., O & Yunitasari, R. (2021). Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. *JMP: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(3), 448–458.

Nugroho, R. (2019). *Public Policy: Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan – Proses*. Elex Media Komputindo.

Anggraini, R., R. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Pendidikan Nasional. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 33(2), 163–170.

Thalhah, M. N. A. (2021). *Kebijakan Publik Bidang Pendidikan*. Rajawali Pers.